PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI DI SMK NEGERI 1 BATUDAA KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

YANTI KARIM MOHA
NIM. D02416358

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI DI SMK NEGERI 1 BATUDAA KABUPATEN GORONTALO

[1]Yanti Karim Moha, [2]Srihandayani Suprapto, [3]Widya Kurniati Mohi
[1,2,3)]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Gorontalo. 2020

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how the implementation of the discipline of civil servants in smk negeri 1 batudaa. This research is a kind of descriptive research with a qualitative approach. In accordance with edward ii theory namely, communication, resources, disposition, bureaucratic sturucture (sop). Based on the results of research and discussion that have been presented previously which shows that the implementation of the discipline of civil servants in smk negeri 1 batudaa kabupaten gorontalo regency has not been optimized. Seen from aspects of the indicators of communication, and resources are going well. But on indicators of disposition and bureaucratic structure (sop) has not gone well, there is still a need for leadership assertiveness of employees relate to the cosequences that will be given.

Keywords : implementation, discipline, civil servants

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai negeri di smk negeri 1 batudaa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan teori edward ii yakni, komunikasi, resources, disposisi, struktur birokrasi (sop). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai negeri di smk negeri 1 batudaa kabupaten gorontalo belum optimal pelaksanaanya. Dilihat dari aspek-aspek pada indikator komunikasi dan resources sudah berjalan dengan baik. Namun pada indikator disposisi dan struktur birokrasi (sop) belum berjalan dengan baik, masih perlu adanya ketegasan pimpinan terhadap pegawai terkait konsekuensi yang akan diberikan

Kata kunci: Pelaksanaan, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh ketaatan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab berlandaskan pancasila dan uud 1945 serta bermental baik dan berakhlak

mulia untuk melaksanakan dan dan menyelenggarakan peraturan-peratuaran yang dibuat oleh pemerintah dan negara peranan pegawai organisasi sangat menentukan keberasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pegawai negeri sipil yang saat ini disebut dengan aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu alat perlengkapan tata usaha negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut harus berdasarkan pada segala peraturan yang mengaturnya yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara.

Aparatur sipil negara (asn) sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia yang mengatur pegawai negeri sipil, salah satu diantaranya adalah peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010 tentang disiplin asn. Di dalam peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi asn yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Faktor disiplin dipandang sebagai suatu aspek yang penting karena melalui disiplin ini dapat diciptakan kesadaran dari setiap pribadi setiap anggota organisasi terhadap eksistensinya serta konstribusi yang dituntut dari padanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pribadinya. Namun dalam kenyataannya faktor kedisiplinan.

Mengacu kepada peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010, maka salah satu pihak yang sangat berperan dalam penegakan disiplin asn adalah atasan, terutama atasan langsung. Dalam tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang tertuang dalam pasal 30 dan 31 dalam aturan ini, peran atasan langsung sangat urgen dalam penegakan disiplin asn. Ini berarti bahwa, penegakan disiplin pns dalam lembaga pemerintahan, tergantung pada upaya pembinaan yang dilakukan oleh atasan pns tersebut.

ASN di SMK Negeri 1 Batudaa sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, seperti: tidak mengikuti apel pagi dan apel sore yang menunjukkan kehadiran dan kepulangan pegawai tidak sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan, tidak mengikuti senam kesehatan jasmani, kegiatan acara agama bulanan hingga tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Masih banyak guru yang sering masuk kelas tidak sesuai jadwal yag telah ditetapkan, padahal mereka hadir dan terihat tidak sibuk, sudah beberapa kali asn yang melanggar kedisplinan mendapat teguran langsung dari atasan, hukuman yang didapat antara lain penundaan penilaian kinerja dalam rangka syarat penerimaan sertifikasi guru, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh para guru yang berada di SMK Negeri 1 Batudaa, demikian halnya juga dengan pegawai honorer, masih sangat banyak yang tidak perduli dengan kedisplinan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mereka masih saja terlambat datang dan cepat pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah diberlakukan.

Permasalahan ditambah lagi dengan penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (pns) dinilai masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Kondisi ini salah satunya akibat peraturan pemerintah (pp) nomor 53/2010 tentang disiplin asn belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin asn. Implementasi tentang aturan teknis tersebut pun masih jauh dari harapan. Apalagi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada subjektivitas pejabat pembina kepegawaian (ppk) masih ada kelemahan-kelemahan sehingga penegakan disiplin asn belum maksimal.

PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin asn hanya berbicara tentang jenis sanksi yaitu ringan, sedang, dan berat. Sementara pelanggarannya didefinisikan oleh masing-masing ppk. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan wawancara dengan kepala tata usaha bapak desman pomontolo menurutnya ada pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi berat, tapi hanya mendapat teguran. "misalnya tidak masuk berhari-hari tanpa kejelasan itu hanya mendapat sanksi teguran.

Berdasarkan masalah yang di terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedisiplinan guru dan pegawai di smk negeri 1 batudaa. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang kedisiplinan yang masih di pandang sebelah mata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan terpercaya serta dapat ditemukan kejadian dalam

konteks sosial. Penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasiakan, ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di SMK Negeri 1 Batudaa artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi
   Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian yang berhubungan dengan system pengelolaan arsip dinamis di SMK Negeri 1 Batudaa.
b. Wawancara
   Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang kedisiplinan di SMK Negeri 1 Batudaa. Serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
c. Dokumentasi
   Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari hasill aporan dan keterangan-keterangan secara tertulis, tergambar, terekam ataupun tercetak seperti foto dan dokumen, cara ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan mengenai kedisiplinan di SMK Negeri 1 Batudaa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara

mendalam serta dokumentasi, dan dapat di deskripsikan sebagai berikut I:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi agar bisa terhubung dengan baik. Komunikasi bisa dilakukan dengan cara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan point komunikasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan disiplin di smk negeri 1 batudaa sudah optimal, karena dilihat dari jawaban-jawaban informan yang lebih mengutamakan disiplin kerja dengan cara penyampaian antar pimpinan dan bawahan dengan baik.

2. Resources (Sumber Daya)

Sumber Daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu unsure tertentu dalam kehidupan. Resouces (Sumber daya) dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Disiplin di SMK Negeri 1 Batudaa terkait dengan point *Resources (sumber daya)* yakni : sudah efektif dalam hal sumber daya nya, kemudian untuk sarana dan prasarana juga sudah optimal karena sudah memiliki alat yaitu fingerprint agar tingkat kedisiplinan lebih tinggi.

3. Disposisi

Disposisi, yaitu sikap dan komitmen daripada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Disposisi juga merupakan instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu keputusan.

Tujuan dari disposisi adalah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan rapat atau surat masuk seperti yang diminta oleh pimpinan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk surat atau tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Disiplin di SMK Negeri 1 Batudaa belum efektif. Dilihat dari point-point pada indikator *Komunikasi dan Resources* sudah berjalan dengan baik. Namun pada indikator *Disposisi dan Struktur Birokrasi (SOP)* belum berjalan dengan baik, masih memerlukan upaya pelaksanaan kedisiplinan yang lebih baik lagi, perlu ditingkatkan lagi disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan sekolah tersebut.

Dalam tiga point tersebut yaitu:
Disposisi : masih adanya pegawai yang seenaknya dengan peraturan yang sudah di tetapkan oleh pimpinan, tanpa memikirkan konsekuensi
Struktur Birokrasi : masih ada beberapa pegawai yang tidak memberlakukan peraturan yang sudah di tetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan agar pelaksanaan disiplin di SMKN Negeri 1 Batudaa dapat terwujud adalah:

1. Perlu adanya ketegasan pimpinan terhadap pegawai terkait konsekuensi yang akan diberikan
2. harus adanya peninjauan kembali terkait dengan SOP yang diberlakukan, agar pegawai taat pada aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Alex S. Nitisemito. 1992. ManajemenPersonalia. Jakarta: Sasmita Bros.

Alfred, R. Lateiner. 2002. TeknikMemimpinPegawaidanPekerja. Terjemahan Imam Soedjono. Jakarta: AksaraBaru.

Davis, Keith. 2000. Fundamental Organization Behavior, Di terjemahkanAgus Dharma. Jakarta: Erlangga

Hasibuan, Melayu, S.P 2003.Manajemen SumberDayaManusia. Jakarta: BumiAksara

Remiwati. 2002. Efektivitas Pelaksanaan Budaya Kerja Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gowa. Skripsi.FIS.UNM. Makassar

Siagian, S. P, 2002. Pengembangan Sumber Daya Insani. Jakarta: Gunung Agung

Soekarno. K. 2002. Dasar-DasarManajemen. Jakarta: Miswar

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian Edisi 2). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

The Liang Gie, dkk. 1997. Enksilopedia Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Rhineka Cipta

Harsono, 2010.Perencanaan Kepegawaian. Bandung: Fokus Media.

Thoha, Miftah. 2007. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hasibuan, Malayu S. P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Akasara.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartini, Sri dkk. 2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.